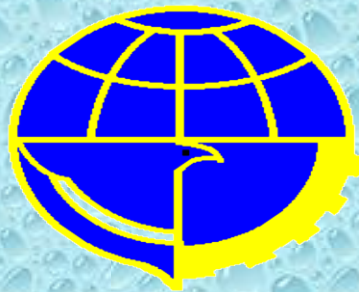




PEMERINTAH KOTA
TANJUNGBALAI

**RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2026**



**DINAS PERHUBUNGAN KOTA
TANJUNGBALAI**

**Jln. Jend. Sudirman Km. 7 Telp. (0623) 7590080
Tanjungbalai**



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 050/ 441 /K/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 125 dan Pasal 16 ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "persiapan meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah";
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
22. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU
- :
: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengumpulkan data dan Informasi, menyusun dokumen Perencanaan sesuai tahapan dan tata cara Perencanaan termasuk melakukan Pengendalian Penyusunan kebijakan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Mei 2025.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 27 Oktober 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI

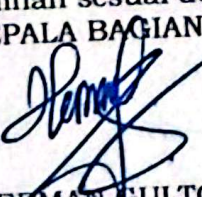
ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai;
2. Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk I / III-d
NIP. 19810630.200604.1.003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 050/ 441 /K/2025
TANGGAL : 22 Oktober 2025
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Kerja Dinas Perhubungan Kota
Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026**

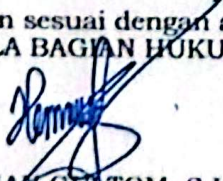
- I. Pembina : Wali Kota Tanjungbalai.
II. Pengarah : Wakil Wali Kota Tanjungbalai.
III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
IV. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.
V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.
VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
2. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
3. Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
4. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
5. Kepala Sub Bagian Program dan keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
6. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
7. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
8. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
9. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
10. Kepala Seksi Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
11. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
12. Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda/Sub Koordinator Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk I / III-d
NIP. 19810630.200604.1.003

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 dapat kami selesaikan.

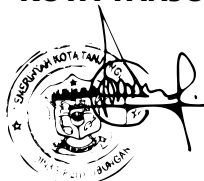
Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 ini disusun berdasarkan tuntutan umum Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi pemerintah kota Tanjungbalai, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai maupun bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai,

2025

**Pt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGBALAI**



**ELVANDIA, S.SiT
PEMBINA TK.I
Nip. 19780111.200312.1.011**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Renja SKPD.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 ...	20
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP.....	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen rencana tahunan di OPD mutlak harus tersedia sebagai acuan kerja untuk mengaktualisasikan kinerja program dan kegiatan. Penyusunan dokumen rencana tahunan yang disebut rencana kerja tahun OPD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun rencana yang telah mempertimbangkan hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum OPD dan penetapan Renja . Dokumen Renja OPD terbagi atas rancangan Renja OPD definitif yang telah disesuaikan dengan dokumen OPD yang telah disahkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Renja OPD yang disusun selain mengacu pada rancangan awal RKPD dan Renstra OPD, juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan renja OPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda menjadi bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir RKPD yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2026 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program

dan kegiatan, indikator kinerja serta dana indikatif dan prakiraan maju 2027.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN.Tahun 2009 Nomor 96, TLN.Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan Perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2020
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Tanjungbalai tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun anggaran 2025;
18. Peraturan Walikota Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2026.
2. Sebagai pedoman Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2026.

3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja-SKPD

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Pada tahun 2024 penetapan program dan kegiatan mengacu pada rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dimana penetapan visi, misi tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut:

Visi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026 adalah "***Dinas Perhubungan yang melayani dan Memudahkan Mobilisasi***". Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut:

Melayani mobilitas, diindikasikan oleh penyelenggara transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai;

Transportasi mempunyai dua fungsi utama yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Fungsi mobilitas dilihat dari pembangunan dapat mempercepat proses pembangunan, sedangkan fungsi aksesibilitas dalam pembangunan terwujud dalam hal pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi. Permintaan Transportasi merupakan turunan dari kebutuhan aktivitas sosial ekonomi.

Dengan pengertian fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai ingin menjadi pelayan yang memudahkan masyarakat untuk memudahkan mobilisasi pengguna angkutan dan distribusi barang/jasa dan memudahkan komunikasi di dalam wilayah Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan uraian dan panduan di atas maka rumusan ***Misi*** Dinas Perhubungan Tahun 2021 sampai Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang aman, cepat, selamat, nyaman, terpelihara, mencukupi kebutuhan, serta ramah lingkungan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tanjungbalai.

Dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, upaya yang dilakukan tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan,

namun peningkatan kualitas SDM transportasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, yang merupakan sistem dalam pelayanan.

2. Membangun prasarana dan sarana serta fasilitas perhubungan yang berkualitas;

Dalam upaya menghilangkan ketertinggalan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sejalan dengan dinamika perkembangan permintaan transportasi . dalam penyediaan prasarana senantiasa berpedoman pada rencana struktur tata ruang.

3. Membangun perwujudan transportasi perkotaan yang berkualitas,efisien dan berkelanjutan dalam pelayanan.

Dalam upaya menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara di perkotaan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada kebijakan dan akan diarahkan pada keterpaduan penangan prasarana dan sarana serta penerapan skema manajemen lalu lintas (*Traffic Management*)

4. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia, meningkatkan kemampuan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas serta pembinaan Teknis tentang pelayanan Operasional Transportasi.

Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan adalah "Mewujudkan keamanan dan keselamatan bertransportasi"

Dan perumusan sasarannya adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas

Dengan Target indikator tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Pemasangan Rambu-rambu, dengan target 55%
- b. Rasio angka kecelakaan lalu lintas menurun, dengan target 80%
- c. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan, dengan target 0,40 v/c
- d. Jumlah titik rawan kemacetan, dengan target 2 titik

2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan;

Dengan target indikator tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kapasitas angkutan umum, dengan target 0,60

Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2024.

Dan semua sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi capaian yang berbeda-beda, seperti tabel dibawah ini:

Tabel.III.1 Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	- Pemasangan rambu-rambu	55%	14,370%	26,12%
		- Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas Menurun	80%	4%	5%
		- Rasio Panjang Jalan Perjumlah kendaraan	0,40	0,87	51,72%
		- Jumlah Titik Rawan Kemacetan	2 Titik	3 titik	75%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan	- Kapasitas angkutan umum	0,60	0,40	66,66%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari capaian realisasi dari sasaran strategis, dimana dari dua sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2024 ada satu satu sasaran kinerja yang indikator kerjanya belum maksimal yaitu pada indikator pemasangan rambu-rambu yang hanya terealisasi 14,37 % dan rasio angka kecelakaan lalu lintas yang hanya terealisasi 4 %. Berikut ini permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapinya realisasi dari target capaian indikator kinerja dinas perhubungan:

a. Pemasangan rambu-rambu.

Jumlah kebutuhan rambu kota tanjungbalai sebesar 3820 unit rambu, Pada tahun 2023 jumlah rambu yang ada sebanyak 409 unit rambu (10,70%). Pada Tahun 2024 Target rambu yang terpasang sebesar 2101 unit rambu (55%), dan hanya terealisasi sebesar 549 unit rambu (14,37 %), Jadi terjadi penambahan hanya 140 unit rambu dari tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan minimnya anggaran Dinas Perhubungan.

b. Rasio angka kecelakaan lalu lintas menurun.

Pada indikator ini terjadi penurunan angka kecelakaan dengan tingkat realisasinya hanya 4%, hal ini diakibatkan jumlah angka kecelakaan tahun 2024 hanya menurun rendah dari jumlah angka kecelakaan tahun

2023, yang mana menurut data dari kepolisian Kota Tanjungbalai, angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 sebanyak 52 angka kecelakaan, sedangkan tahun 2024 angka kecelakaan sebanyak 49 angka kecelakaan. Jadi terjadi penurunan angka kecelakaan sebanyak 3 angka kecelakaan dari tahun sebelumnya, Jadi Penurunan angka kecelakaan Tahun 2024 sebesar 4%. Hal ini diakibatkan:

1. Banyaknya Fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas, traffic light yang sudah tidak berfungsi, dan fasilitas rambu lain yang tidak memadai.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah tersedia.

c. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan.

Pada Tahun 2023 realisasi yang dicapai 0,45 v/c. Sedangkan Pada Tahun 2024 realisasi yang dicapai 0,87 v/c dari target 0,45 v/c atau terealisasi 51,72 %, Jadi Terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, yang mengakibatkan pada ruas tertentu terjadi kemacetan lalu lintas hal ini disebabkan karena ruas ini menuju pelabuhan yang banyak dilalui oleh kendaraan dan angkutan barang dan melintasi perlintaasan sebidang dengan kondisi jalan yang rusak (berlubang) dan kondisi hambatan samping yang cukup tinggi . Untuk mengatasi padatnya arus lalu lintas jalan di beberapa ruas jalan di kota Tanjungbala, dinas perhubungan melakukan koordinasi dengan satlantas Polres Tanjungbalai untuk melakukan pengendalian arus lalu lintas dengan menurunkan personil untuk mengurai kemacetan lalu lintas.

d. Jumlah rawan kemacetan.

Pada Tahun 2023 Realisasi titik rawan kemacetan sebanyak 4 titik, dan pada tahun 2024 dari target 2 titik rawan kemacetan, terealisasi sebanyak 3 titik atau pencapaiannya 75 % . Jadi Pencapaian indikator pada jumlah rawan kemacetan pada tahu 2024 sama dengan pencapaian realisasi tahun 2023. Hal ini dapat tercapai diakibatkan pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas yang dilakukan dinas perhubungan dengan menempatkan personil dinas perhubungan ditempat-tempat yang rawan kemacetan seperti di tempat-tempat jualan yang dilalui oleh pengendara kendaraan.

e. Kapasitas angkutan umum

Pada Tahun 2023 realisasi capaiannya sebesar 0,40, Sedangkan Pada Tahun 2024 targetnya 0,60 dan terealisasi 0,40, atau dengan kata lain dari target kapasitas penumpang terisi 50% yang telah ditentukan, terealisasi kapasitas penumpang 40%, hal ini dikibatkan pengguna angkutan umum yang kurang diminati masyarakat, karena sarana prasarana angkutan yang kurang memadai.

Dari sisi realisasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 Dinas Perhubungan memiliki anggaran sebesar **Rp. 7.381.181.452-** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.716.568.663-** dan nilai capaian keberhasilan sebesar **91%**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2024 diperuntukkan bagi belanja urusan wajib bidang perhubungan.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan di Dinas Perhubungan sampai akhir tahun kegiatan tahun 2024 sudah berhasil. Beberapa output kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang dicapai pada tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Terlaksananya jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Tersedianya Alat Tulis Kantor
6. Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan
7. Terlaksananya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Tersedianya Makanan Dan Minuman
10. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
13. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14. Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun
15. Tersedianya Renja SKPD
16. Tersedianya pemasangan rambu-rambu lalu lintas
17. Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota

Pelaksanaan tugas-tugas layanan di Dinas Perhubungan yang utamanya adalah pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan juga telah terlaksana dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2026 ini pencapaian rencana kerja ini masih difokuskan kepada sasaran peningkatan kualitas SDM aparatur Dinas Perhubungan , peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan angkutan, peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas, peningkatan pelayanan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung fasilitasi layanan di Dinas Perhubungan juga mewujudkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.

2.1.1. Realisasi Kinerja dan Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Realisasi kinerja dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang telah terealisasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Capaian (%)
1	3	4	8	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.471.926.402	5.959.516.063	92,08
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.102.246.847	3.872.778.352	94,41
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.099.246.847	3.869.778.352	94,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00
4	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.821.00	143.698.100	85,63
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	104.040.000	103.018.000	99,02
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63781.000	40.680.100	63,78
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.942.860	394.271.768	95,48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.850	3.942.050	98,43
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.585.360	115.567.650	96,64
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.994.000	44.657.000	99,25
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.150	35.949.150	71,90
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.975.000	99,50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.359.500	189.180.918	99,91
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.400.000	49.400.000	100,00
	Pengadaan Peralatan mesin lainnya	49.400.000	49.400.000	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.455.317.095	1.303.398.488	89,56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.798.695	40.329.548	56,96
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	23.456.000	93,82
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.356.518.400	1.236.612.940	91,16
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.198.600	185.969.355	67,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.437.600	32.675.000	82,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234.761.000	153.294.355	65,30

B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	909.255.050	757.052.600	83,26
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	413.844.000	399.578.600	96,55
	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	353.844.000	343.743.600	97,15
	Rehabilitas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	60.000.000	55.835.000	93,06
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	495.411.050	357.474.000	72,16
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	495.411.050	357.474.000	72,16
JUMLAH		7.381.181.452	6.716.568.663	91,00

Pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas perhubungan tahun 2024 semua terealisasi dengan persentase realisasi rata-rata diatas 90 %, hal ini diakibatkan pekerjaan yang dilakukan lebih banyak bersifat rutin, sehingga pekerjaan teknis yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator dinas perhubungan belum tercapai, seperti pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan masih minim dalam hal penganggaran.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya Target Kinerja Keluaran Program/Kegiatan

Faktor- faktor penyebab dari beberapa program/kegiatan yang memenuhi capaian target umumnya disebabkan karena manajemen kepemimpinan di Dinas Perhubungan yang mulai mengarah kepada pencapaian kinerja selain didukung oleh SDM aparatur yang memadai, sarana dan prasarana yang mencukupi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu.

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang telah Memenuhi Target Kinerja Keluaran Yang Direncanakan.

Secara teknis Hampir semua program kegiatan yang memenuhi target dari anggaran yang telah diberikan dengan realisasi keseluruhan sebesar 91 % .

3. Faktor-Faktor Penyebab Realisasi Melebihi Target Kinerja Keluaran Program/Kegiatan

Selama tahun 2024 ini belum ada program kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja keluaran. Sehingga faktor-faktor yang turut mendorong

kepada pencapaian realisasi yang melebihi tidak ditemukan. Realisasi setiap program kegiatan memenuhi target rencana.

4. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Implikasi yang timbul akibat capaian Program dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai secara umum tidak mempengaruhi pada kegiatan yang telah dilaksanakan, dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, jadi dalam segi Perencanaan tidak berpengaruh secara langsung hal itu dapat kita lihat dari realisasi penyerapan Anggaran yang mencapai 91 persen namun hal ini tidak menjadi ukuran sebab kinerja tidak hanya dapat diukur melalui realisasi keuangan, namun dapat juga diukur dari indikator hasil (*outcome*) yang telah dicapai.

5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Untuk mengatasi faktor – faktor tersebut Dinas Perhubungan tetap terus melakukan kebijakan yang bertujuan agar capaian Program akan terpenuhi, dan pada prinsipnya kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang mengarah kepada sektor transportasi yang langsung dinikmati oleh masyarakat arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan memberikan informasi yang handal kepada masyarakat upaya tersebut antara lain meliputi :

- a) Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi;
- b) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi baik dikawasan perkotaan maupun daerah belum berkembang;
- c) Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

A. Bidang Transportasi Darat

Arah kebijakan transportasi darat meliputi:

- a) Peningkatan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya;
- b) Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya;

- c) Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk Masyarakat;
- d) Meningkatkan keselamatan transportasi darat secara komprehensif dan terpadu;
- e) Pengembangan transportasi darat berkelanjutan;
- f) Pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota.

B. Bidang Pelayaran dan angkutan sungai dan penyeberangan

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pembangunan sistem yang memperlancar dan mempermudah pelayanan serta peningkatan SDM dan pengembangan institusi sesuai amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dilakukan upaya - upaya sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan pelabuhan;
- b) Membangun dan meningkatkan kualitas terminal penumpang;
- c) Membangun sistem pelayanan dan Sosialisasi kepada Pengusaha Pelayaran;
- d) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;

C. Penunjang Transportasi

Arah kebijakan penunjang transportasi di lingkungan Dinas Perhubungan meliputi:

- a) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyiapan tugas pokok dan fungsi;
- b) Memberikan kesempatan yang luas kepada PNS di lingkungan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan di sektor transportasi;
- c) Reformasi dan restrukturisasi organisasi yang mampu mengantisipasi perkembangan sektor transportasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- d) Perencanaan dan penelaahan peraturan di bidang transportasi baik Darat, Pelayaran dan ASDP ;
- e) Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal yang antara lain meliputi:

- Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasi yang sesuai dengan sistem dan prosedur;
 - Terselenggaranya pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan sarana dan prasarana dengan baik;
 - Terwujudnya pelayanan administrasi pembiayaan yang efektif dan efisien;
- f) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan berlaku;
- g) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada;
- h) Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan Dinas Perhubungan ;
- i) Pengelola Anggaran yang berkualitas;

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dirangkum dalam Tabel T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mengemban tugas membantu Walikota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan tekhnis bidang perhubungan
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan
4. Pemberian dukungan dan koordinasi dengan instansi pelayanan perizinan
5. Penyusunan rencana kebijakan umum, operasional dan evaluasi dibidang perhubungan
6. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut, dan ASDP
7. Pengendalian administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga dinas perhubungan

8. Penyelenggaraan unit pelaksana teknis di lingkungan dinas
9. Pelaksanaan pengaman dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya
11. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan

Keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan yang akan direncanakan Tahun 2021-2026 serta proyeksi untuk tahun 2021-2026 dirangkum pada Tabel T-C.30.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu-isu strategis adalah sesuatu yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Dinas Perhubungan sesuai kompetensi dan kebutuhan dalam mendukung Tata Kelola dan Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
2. Penegakan hukum terhadap pelanggran transportasi khususnya angkutan orang dan barang yang tidak memenuhi standard sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Berkembangnya Transportasi yang berbasis teknologi aplikasi yang belum didukung dengan aturan
4. Lalu lintas yang berkeselamatan dalam arti aman, nyaman, efisien dan efektif
5. Peningkatan pengawasan, pengelolaan dan pelayanan keselamatan berlalu lintas di jalan raya ;

Untuk menindak lanjuti isu-isu strategis tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai perlu mengambil langkah-langkah berikut ini:

1. Melakukan suatu perencanaan yang matang untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.
2. Membuat suatu usulan kegiatan yang sejalan dengan program – program dari Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat.

3. Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Propinsi untuk mengusulkan anggaran yang dibiayai oleh APBN dan APBD Propinsi.
4. Melaksanakan program – program yang berskala prioritas agar pelayanan jasa transportasi akan terwujud.
5. Membuat suatu peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.
6. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM dibidang perhubungan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2026 yang tercantum dalam rancangan awal RKPD terdapat sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah ditetapkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran, meskipun demikian hal ini diupayakan tidak mengganggu esensi secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu perbedaan bisa saja terjadi akibat penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan baru oleh Pemerintah Pusat dan atau oleh Pemerintah Provinsi yang mengharuskan sebuah program/kegiatan baru ditampung sementara pada saat rancangan awal disusun informasi belum diterima.

Review program/kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 terhadap rancangan awal RKPD 2026 disajikan pada **Tabel T-C.31**.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan peran dan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan sudah tertampung dalam dokumen Renstra 2021 - 2026, namun tidak semua dapat terrealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah menyebabkan usulan – usulan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, salah satu Usulan dari masyarakat adalah agar meningkatkan pelayanan dibidang transportasi darat yaitu rehabilitasi Terminal dan juga pengujian kendaraan bermotor.

Karena Terminal merupakan salah satu pelayanan yang harus diberikan Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Perhubungan dan merupakan skala prioritas

yang harus segera dilaksanakan namun sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan, namun demikian Dinas Perhubungan berupaya mengajukan anggaran Rehabilitas Terminal kepada Dinas Perhubungan Provinsi agar dapat dianggarkan karna sejak tahun 2018 kewenangan terminal sijambi sudah berada di Dinas Perhubungan Provinsi. Demikian juga dengan pengujian kendaraan bermotor, tidak dapat melakukan pengujian di kota Tanjungbalai karena tidak adanya alat pengujian kendaraan bermotor sehingga Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mengarahkan masyarakat yang mau menguji ke Kabupaten Asahan.

Selain usulan tersebut diatas masyarakat hanya memberikan masukan – masukan yang bersifat untuk meningkatkan pelayanan secara langsung seperti pengaturan dan pengenedalian arus lalu lintas yang bersifat insidensil dan itu merupakan salah satu fungsi pelayanan yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Perhubungan dan juga perbaikan sarana dan prasarana jalan seperti perbaikan traffic light dan rambu rambu dan pembuatan marka jalan dan zebra cross.

BAB III **TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan terkait dengan perencanaan di OPD harus mengacu pada kebijakan di tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional yang tercantum di dalam dokumen-dokumen perencanaan pada masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dari dokumen Rencana Jangka Panjang Departemen Perhubungan tahun 2005-2025 demikian juga dengan dengan kebijakan Provinsi dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun yang sama. Telaahan tujuan dan sasaran di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai terkait dengan kebijakan Nasional dan Provinsi adalah yang terkait dengan urusan bidang Pembangunan dan Pengembangan Transportasi baik Darat, Pelayaran dan ASDP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan nasional terkait bidang Pembangunan dan Pengembangan Transportasi adalah mewujudkan Sistem Transportasi Nasional dalam seluruh hirarkinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan transportasi yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan transportasi bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
2. Kebijakan Provinsi terkait bidang perencanaan adalah mewujudkan peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya perencana pembangunan daerah; Mewujudkan sarana prasarana dan jaringan perencanaan (*planning-network*) yang memadai; Menciptakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal dan mewujudkan monitoring pelaksanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien.
3. Kebijakan Kota Tanjungbalai terkait bidang Transportasi adalah:
"Mewujudkan layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau"

Dari ketiga poin di atas terlihat bahwa kebijakan yang tertuang di dalam sasaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai telah selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi di bidang pembangunan dan Pengembangan Transportasi. Dengan kata lain bahwa peran dan fungsi layanan di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai telah mendukung kebijakan nasional dan Provinsi di bidang pembangunan dan Pengembangan Transportasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada rancangan Renstra Dinas Perhubungan untuk menjelaskan capaian sasaran target kinerja setiap tahunnya. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat 1 (Tujuan) tujuan dan 2 (dua) sasaran pada rancangan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 yakni:

“Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau”

Dan perumusan sasarannya adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
Dengan indikator sasaran :
 - a. Jumlah kecelakaan lalu lintas
 - b. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
 - c. Volume kapasitas di jalan kota
 - d. Jumlah angkutan umum laik jalan
2. Meningkatnya kualitas layanan angkutan pelayaran;
Dengan indicator sasaran Jumlah sarana dan prasarana angkutan pelayaran

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran di atas, berikut diuraikan beberapa sasaran target kinerja untuk tahun 2026:

1. Transportasi Darat

Sasaran pembangunan transportasi darat adalah :

- a. Penurunan kejadian kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan
- b. Peningkatan disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya
- c. Peningkatan pelayanan angkutan
- d. Peningkatan sarana dan prasarana LLAJ
- e. Peningkatan jumlah prasarana dan sarana keselamatan LLAJ
- f. Pemeliharaan fasilitas LLAJ
- h. Peningkatan keselamatan Pelayaran dan ASDP;
- i. Peningkatan jumlah prasarana Dermaga/Tambatan kapal untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan
- j. Peningkatan fasilitas Dermaga/Pelabuhan

2. Keselamatan Transportasi

Sasaran pembangunan keselamatan transportasi adalah terwujudnya :

- a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan dan jalur pelayaran sungai, kualitas lingkungan, alur transportasi serta pemeliharaan alur ASDP untuk dapat mewujudkan keselamatan transportasi darat;
- b. Peningkatan sistem data kecelakaan LLAJ dan ASDP yang akurat, kredibel, dan up to date;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan dunia pendidikan dalam mewujudkan keselamatan transportasi darat;
- d. Peningkatan disiplin dan kesadaran pengguna jalan baik pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, pengemudi , serta pejalan kaki;
- e. Peningkatan kualitas SDM dalam perencanaan dan penyelenggaraan keselamatan transportasi darat;
- f. Penyelenggaraan angkutan orang, barang baik angkutan jalan maupun angkutan sungai dan penyeberangan yang aman, nyaman dan selamat;
- g. Penurunan jumlah dan tingkat fatalitas dan kecelakaan transportasi darat.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Rancangan awal Rencana kerja tahun 2026 Dinas Perhubungan mengusulkan anggaran APBD sebesar Rp. 8.530.109.548,- dengan melaksanakan 3 (Tiga) program dan 16 (Enam Belas) kegiatan, yang mana anggaran ini sudah termasuk gaji dan tunjangan ASN dinas perhubungan Kota Tanjungbalai. Selain itu terdapat juga kegiatan prioritas Dinas Perhubungan berupa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, penyediaan perlengkapan jalan berupa pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan juga rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Fokus kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 adalah dengan melakukan pengendalian arus lalu lintas di inti kota dengan menempatkan personil dinas perhubungan di titik-titik kemacetan arus lalu lintas.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 di rangkum di dalam Tabel T-C.33.

BAB IV PENUTUP

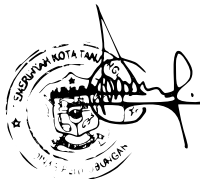
Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai merupakan dasar pedoman acuan kerja untuk mengaktualisasikan kinerja program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang telah mempertimbangkan hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026 ini telah memberikan kerangka utama dalam pengembangan transportasi di Tanjungbalai. Pengembangan yang tercakup dalam RENJA untuk menjabarkan kegiatan pada 1 (satu) tahun kedepan sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai agar program dan kegiatan yang telah direncanakan lebih efektif dan efisien serta dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kota Tanjungbalai serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungbalai, 2025
Plt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGBALAI



ELVANDIA, S.SiT
PEMBINA TK. I
NIP. 19780111.200312.1.011

Tabel T-C.33.
Rencana Kerja Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026 (Rp)	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%						7.503.325.048
2.15.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%				3.626.200
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dok	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dok		2.241.400
	06 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap	Jumlah Laporan capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap		1.384.800
2.15.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100%				4.267.656.020
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 org/bln	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 org/bln		4.266.218.020
	05 Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun skpd	1 lap	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun skpd	1 lap		1.438.000
2.15.01.2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100%				888.800

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.01.2.05	01 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	888.800
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi	100%			0
2.15.01.2.06	02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99 stel	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99 stel	0
	09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	2 org	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	2 org	0
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100%			105.343.100
	01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.003.000
	02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	13.190.200
	03 Penyediaan peralatan rumah tangga	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	0
	04 Penyediaan bahan logistik kantor	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	12.000.000
05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	32.982.400	
06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	4.992.500	

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.01.2.07	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	40.175.000
	6 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			0
	01 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 unit	0
	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 unit	0
	03 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0
2.15.01.2.08	04 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	0 unit	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	0 unit	0
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			2.978.660.928
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	3.000.000
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	1.570.776.148
	03 Penyediaan jasa peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 lap	jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 lap	20.180.000

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	1.384.704.780
2.15.01.2.09	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			147.150.000
	01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	0
	02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	147.150.000
	06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 unit	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 unit	0
	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	T.balai			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	1 unit	0
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya	T.balai	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%					1.021.984.500
2.15.02.2.02	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Persentase ketersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100%			796.596.500
	01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang terbangun	0 unit	Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang terbangun	0	0
	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	65 unit	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	11 unit	19.800.000

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	1 keg	0
	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4 keg	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	1 keg	776.796.500
2.15.02.2.03	3 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					Persentase ketersediaan terminal penumpang tipe c	100%			0
	02 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 unit	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 unit	0
	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	0 unit	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	0 unit	0
2.15.02.2.05	4 Pengujian berkala kendaraan bermotor					Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	100%			0
	01 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	0 unit	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	0 unit	0
	02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan motor yang ditingkatkan kapasitasnya	0 org	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan motor yang ditingkatkan kapasitasnya	0 org	0
2.15.02.2.06	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%			171.581.000

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.15.02.2	04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	12 lap	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	12 lap	171.581.000	
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	0	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	0	0	
	05 Forum lalu lintas dan angkutan jalan kab/kota	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kab/kota	12 lap	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kab/kota	12 lap	0	
	6 Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota					Persentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang	100%				50.160.000
	02 Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	12 lap	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	12 lap	50.160.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0		
2.15.02.2.11	7 Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota					Persentase tersusunnya rencana umum jaringan trayek perkotaan	100%			3.647.000	
	01 Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah kab/kota	1 dok	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah kab/kota	1 dok	3.647.000	

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi	T.balai	Cakupan pengelolaan pelayaran	100%					4.800.000
2.15.03.2.13	2 Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau					Persentase penerbitan izin dan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	100%			4.800.000
	01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 dok	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 dok	0
	04 Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	1 lap	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	1 lap	4.800.000
	05 Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia		Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia		0
	06 Pembangunan dermaga sungai dan danau	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi	T.balai			Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun		Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun		0
	TOTAL									8.530.109.548

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Prakiraan Maju Tahun 2027 (Rp)
(13)
7.306.326.243
8.000.000
5.000.000
3.000.000
4.297.092.520
4.294.092.520
3.000.000
2.000.000

(13)

2.000.000

158.000.000

128.000.000

30.000.000

339.500.000

4.500.000

30.000.000

40.000.000

20.000.000

40.000.000

5.000.000

(13)

200.000.000

750.000.000

400.000.000

300.000.000

50.000.000

0

1.497.273.723

3.000.000

58.177.123

50.000.000

(13)

1.386.096.600

254.460.000

38.420.000

216.040.000

0

0

3.345.460.000

800.000.000

100.000.000

400.000.000

(13)

100.000.000

200.000.000

0

0

0

1.520.000.000

1.500.000.000

20.000.000

750.000.000

(13)

450.000.000

100.000.000

200.000.000

225.460.000

125.460.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

|

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024
Kota Tanjungbalai

NAMA OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dalam Renstra SKPD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan awal Renstra Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 Lap	3 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	4 Lap	80%
	Adminstrasi Keuangan perangkat daerah									
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	gaji ASN	37 Asn	37 Asn	37 Asn	37 Asn	100%	37 Asn	37 Asn	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 Lap	3 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	4 Lap	80%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Lap	3 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	4 Lap	80%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200 stel	0 stel	114 stel	114 stel	100%	- stel	114 stel	57%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimtek	5 kali	0 kali	6 kali	6 kali	100%	- kali	6 kali	120%
	Adminstrasi Umum perangkat daerah									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jenis Komponen Instalasi	5 Pak	3 pak	1 pak	1 pak	100%	1 pak	4 pak	80%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Pak	3 pak	1 pak	1 pak	100%	1 pak	4 pak	80%	
	Penyediaan bahan logistik kantor	makan minum	5 pak	3 pak	1 pak	1 pak	100%	1 pak	4 pak	80%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	5 pak	3 pak	1 pak	1 pak	100%	1 pak	4 pak	80%	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	320 lap	189 lap	64 lap	64 lap	100%	30 lap	253 lap	79%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	- unit	0%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	0 unit	- unit	- unit	0%	- unit	- unit	0%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	0 unit	8 unit	8 unit	0%	4 unit	8 unit	32%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luasan gedung yang dibangun	1 unit	0 unit	- unit	- unit	0%	- unit	- unit	0%	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah										
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai	1.250 lap	800 lap	300 lap	300 lap	100%	300 lap	1.100 lap	88%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tagihan air, listrik, internet dll	120 lap	72 lap	24 lap	24 lap	100%	24 lap	96 lap	80%	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 lap	25 lap	10 lap	10 lap	100%	10 lap	35 lap	70%	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan	240 lap	144 lap	48 lap	48 lap	100%	48 lap	192 lap	80%	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah										
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan	5 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	80%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan	78 unit	39 unit	13 unit	13 unit	100%	18 unit	52 unit	67%	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	25 unit	15 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	20 unit	80%	
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)										

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota									
	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang terbangun	4 unit	0 unit	- unit	- unit	0%	- unit	- unit	0%
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	195 unit	42 unit	140 unit	140 unit	100%	60 unit	182 unit	93%
	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terpelihara	1 unit	- unit	0 unit	- unit	0%	0 unit	- unit	0%
	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	13 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4 unit	31%
	Pengujian berkala kendaraan bermotor									
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya DED dan sarana prasarana pengujian	1 unit	- unit	0 unit	- unit	0%	0 unit	- unit	0%
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah PNS yang terlatih	2 org	- org	0 org	0 org	0%	0 org	0 org	0%
	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota									
	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengawasan	129 lap	63 lap	10 lap	10 lap	100%	10 lap	73 lap	57%
	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota									
	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen data base dinas perhubungan kota Tanjungbalai	1 dok	0 dok	- dok	- dok	0%	- dok	- dok	0%
	Program pengelolaan pelayaran									
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	72 kali	10 kali	5 kali	5 kali	100%	5 kali	15 kali	21%
	- Pengawasan angkutan sungai									

Tanjungbalai, 2025
 PIt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA TANJUNGBALAI



ELVANDIA, S.SiT
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19780111.200312.1.011

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN					Realisasi Capaian				Proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	590.702	610.702	610.702	635.702	665.702	695.702	590.702	461.084	484.138	508.345	533.762
2	Rasio ijin trayek	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600
3	Jumlah uji kir angkutan umum	200	200	200	200	200	200	0				
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis	6	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5	Persentase layanan angkutan darat	10%	10%	20%	25%	30%	40%	10%	18%	20%	20%	20%
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	86%	80%	80%	70%	60%	50%	86%	0%	0%	0%	0%
7	Pemasangan Rambu-Rambu	10%	10%	15%	35%	55%	75%	10%	10%	11%	14,37%	20%
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,45 v/c	0,45 v/c	0,45 v/c	0,45 v/c	0,47 v/c	0,50 v/c	0,45 v/c	0,45 v/c	0,38 v/c	0,87 v/c	0,50v/c
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum											
	* Orang	590.702	610.702	610.702	635.702	665.702	695.702	590.702	461.084	484.138	508.345	533.762
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun											
	* Orang	649.772	649.772	25.000	25.000	30.000	30.000	649.772	20.644	21.676	22.760	23.898

Tanjungbalai, 2025
 Plh. Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Tanjungbalai



ELVANDIA, S.SiT
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19780111.200312.1.011

Catatan analisis
<i>(11)</i>

367+15

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2026
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI

Kode	Rancangan Awal RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2026 (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	T.balai			6.782.859.707	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	T.balai		
2.15.01.2.1	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	8.000.000	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	T.balai	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dok	5.000.000	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	T.balai	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dok
	06 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	T.balai	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 lap	3.000.000	06 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	T.balai	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	1 lap
2.15.01.2.2	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terselenggaranya administrasi	100%	4.297.092.520	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terselenggaranya administrasi	100%
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	T.balai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 org/bln	4.294.092.520	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	T.balai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 org/bln
	05 Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	T.balai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun skpd	1 lap	3.000.000	05 Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	T.balai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun skpd	1 lap
2.15.01.2.3	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya laporan	100%	2.000.000	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya laporan	100%
	01 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	T.balai	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap	2.000.000	01 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	T.balai	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 lap
2.15.01.2.4	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan kegiatan	100%	148.000.000	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	T.balai	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	114 stel	128.000.000	02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya	T.balai	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	114 stel
	09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	T.balai	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	4 org	20.000.000	09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	T.balai	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	4 org
2.15.01.2.4	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana	100%	316.033.464	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana	100%
	01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	T.balai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.000.000	01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	T.balai	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
	02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	T.balai	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	27.033.464	02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	T.balai	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket
	03 Penyediaan peralatan rumah tangga	T.balai	jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	20.000.000	03 Penyediaan peralatan rumah tangga	T.balai	jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket
	04 Penyediaan bahan logistik kantor	T.balai	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	20.000.000	04 Penyediaan bahan logistik kantor	T.balai	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket
	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	T.balai	jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	40.000.000	05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	T.balai	jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	T.balai	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	5.000.000	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	T.balai	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok
	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	T.balai	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 lap	200.000.000	09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	T.balai	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75 lap
2.15.01.2.4	6 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	270.000.000	6 Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	01 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	T.balai	jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	250.000.000	01 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	T.balai	jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit
	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T.balai	jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	20.000.000	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T.balai	jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit
	03 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.balai	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0	03 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	T.balai	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	
	04 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	T.balai	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	0 unit	0	04 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	T.balai	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya disediakan	0 unit
2.15.01.2.4	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.487.273.723	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	T.balai	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	300 lap	3.000.000	01 Penyediaan jasa surat menyurat	T.balai	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	300 lap
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	T.balai	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 lap	58.177.123	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	T.balai	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 lap
	03 Penyediaan jasa peralatan kerja dan perlengkapan kantor	T.balai	jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan	1 lap	40.000.000	03 Penyediaan jasa peralatan kerja dan perlengkapan kantor	T.balai	jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan	1 lap
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	T.balai	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	12 lap	1.386.096.600	04 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	T.balai	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	12 lap
2.15.01.2.4	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	254.460.000	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	T.balai	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	38.420.000	01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	T.balai	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	T.balai	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	216.040.000	02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	T.balai	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit
	06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	T.balai	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 unit	0	06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	T.balai	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 unit
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	T.balai			617.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	T.balai		
2.15.02.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase ketersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100%	260.000.000	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase ketersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100%
	01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang terbangun	0 unit	0	01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang	0 unit
	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	1 paket	200.000.000	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang	1 paket
	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	T.balai	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		0	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	T.balai	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	
	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	T.balai	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	2 unit	60.000.000	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	T.balai	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	2 unit
2.15.02.2.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase ketersediaan terminal penumpang tipe c	100%	0	3 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase ketersediaan terminal penumpang tipe c	100%
	02 Pembangunan gedung terminal	T.balai	Jumlah gedung terminal yang terhangun	0 unit	0	02 Pembangunan gedung terminal	T.balai	Jumlah gedung terminal yang terhangun	0 unit
	03 Pengembangan sarana dan prasarana terminal	T.balai	Jumlah sarana dan prasarana terminal	0 unit	0	03 Pengembangan sarana dan prasarana terminal	T.balai	Jumlah sarana dan prasarana terminal	0 unit
	04 Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal(fasilitas utama dan pendukung)	T.balai	Jumlah terminal yang terpelihara	0 unit	0	04 Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal(fasilitas utama dan pendukung)	T.balai	Jumlah terminal yang terpelihara	0 unit
2.15.02.2.4	Pengujian berkala kendaraan bermotor		Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	0	4 Pengujian berkala kendaraan bermotor		Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.02.2.4	01 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan	T.balai	Jumlah sarana dan prasarana pengujian	0 unit	0	01 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	T.balai	Jumlah sarana dan prasarana pengujian	0 unit
	02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	T.balai	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan	0 org	0	02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	T.balai	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan	0 org
	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%	357.500.000	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%
	04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota - Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di	T.balai	Jumlah laporan pengawasan dan	12 lap	357.500.000	04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota - Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	T.balai	Jumlah laporan pengawasan dan	12 lap
05 Forum lalu lintas dan angkutan jalan kab/kota	T.balai	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kab/kota	0 lap	0	05 Forum lalu lintas dan angkutan jalan kab/kota	T.balai	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kab/kota	0 lap	
2.15.02.2	6 Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota		Persentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang	100%	0	6 Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota		Persentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang	100%
	02 Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	T.balai	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	0 lap	0	02 Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	T.balai	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) kab/kota	0 lap
2.15.02.2.7	7 Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya rencana umum jaringan trayek	100%	200.000	7 Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya rencana umum jaringan	100%
	01 Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	T.balai	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah kab/kota		200.000	01 Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	T.balai	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah kab/kota	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	T.balai			100.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	T.balai		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.03.2.	1 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan lintas penyeberangan angkutan sungai	100%	0	1 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan lintas penyeberangan angkutan sungai	100%
	02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	T.balai	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kab/kota	0 lap	0	02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	T.balai	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah	0 lap
2.15.03.2.	2 Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau		Persentase penerbitan izin dan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	100%	100.000.000	2 Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau		Persentase penerbitan izin dan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	100%
	04 Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	T.balai	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian	0 lap	0	04 Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	T.balai	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian	0 lap
	05 Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau	T.balai	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia	5 unit	100.000.000	05 Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau	T.balai	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang	5 unit
	06 Pembangunan dermaga sungai dan danau	T.balai	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun		0	06 Pembangunan dermaga sungai dan danau	T.balai	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun	
	TOTAL				7.500.559.707	TOTAL			

Tanjungbalai,
Pih. KEPALA DINAS PERHUBUNG
KOTA TANJUNGBALAI



ELVANDIA, S.SIT
PEMBINA TK.I
NIP. 19780111.200312.1.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Pagu Indikatif Tahun 2026 (Rp)	Catatan Penting
(11)	(12)
6.782.859.707	
8.000.000	
5.000.000	
3.000.000	
4.297.092.520	
4.294.092.520	
3.000.000	
2.000.000	
2.000.000	
148.000.000	

(11)	(12)
128.000.000	
20.000.000	
316.033.464	
4.000.000	
27.033.464	
20.000.000	
20.000.000	
40.000.000	
5.000.000	
200.000.000	
270.000.000	

(11)	(12)
250.000.000	
20.000.000	
0	
0	
1.487.273.723	
3.000.000	
58.177.123	
40.000.000	
1.386.096.600	
254.460.000	
38.420.000	

(11)	(12)
216.040.000	
0	
617.700.000	
260.000.000	
0	
200.000.000	
0	
60.000.000	
0	
0	
0	
0	
0	

(11)	(12)
0	
0	
357.500.000	
357.500.000	
0	
0	
0	
200.000	
200.000	
100.000.000	

(11)	(12)
0	
0	
100.000.000	
0	
100.000.000	
0	
7.500.559.707	

2025
iAN

(11)	(12)
------	------